

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Administrasi Publik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas***

Oleh

Muhammad Refo Baqirdin Zaim

2210842031



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

ABSTRAK

Muhammad Refo Baqirdin Zaim, 2210842031, *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 2026. Dibimbing oleh: Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA dan Dr. Roni Ekha Putera S. IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 167 halaman dengan 2 buku teori, 4 buku metode, 10 jurnal, 1 artikel, dan 4 dokumen.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan bencana banjir di Kota Padang yang terjadi secara berulang dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Penanganan banjir tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja karena adanya perbedaan kewenangan, keterbatasan anggaran, serta penguasaan data yang berbeda pada setiap lembaga. Kondisi tersebut mendorong perlunya tata kelola kolaboratif yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sementara keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Kerangka teori yang digunakan adalah Collaborative Governance dari Ansell dan Gash sebagai instrumen analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi serta membedah dinamika proses kolaborasi antaraktor, yang mencakup empat variabel utama yaitu kondisi awal, desain institusi, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kota Padang dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, kewenangan, anggaran, dan penguasaan informasi antaraktor yang mendorong saling ketergantungan. Kepemimpinan fasilitatif mampu memperkuat koordinasi dan mengurangi ego sektoral, meskipun keterlibatan masyarakat dalam perencanaan strategis masih terbatas. Pembagian peran telah diatur melalui regulasi, tetapi integrasi dan keterbukaan data antarinstansi masih perlu ditingkatkan. Proses kolaborasi telah menghasilkan capaian awal berupa pemasangan *Early Warning System* (EWS), sinkronisasi program, dan pemeliharaan drainase. Namun, komitmen dan pemahaman bersama masih lebih berorientasi pada respons kedaruratan dan penanganan dampak banjir daripada penyelesaian akar permasalahan secara ekologis dan preventif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat agar penanggulangan banjir di Kota Padang dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Kolaborasi, Bencana Banjir, Kota Padang

ABSTRACT

Muhammad Refo Baqirdin Zaim, 2210842031, Collaborative Governance in Flood Disaster Management in Padang City, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang. 2026. Supervised by: Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA and Dr. Roni Ekha Putera S. IP, M.PA. This thesis consists of 167 pages with 2 theory books, 4 method books, 10 journals, 1 article, and 4 documents.

This thesis is motivated by the recurring flood problems in Padang City, which cause significant losses for the community. Handling floods cannot be done by just one agency because of differences in authority, budget limitations, and varying data ownership across institutions. This situation highlights the need for collaborative management involving the Regional Disaster Management Agency (BPBD), the Sumatera V River Basin Authority (BWS), the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR), and the Environmental Agency (DLH).

This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, while data validity was ensured through source triangulation. The theoretical framework used is Collaborative Governance by Ansell and Gash as an analytical tool to identify factors influencing the success of collaboration and to analyze the dynamics of the collaborative process among actors, which includes four main variables: initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and the collaborative process.

The research findings indicate that the implementation of collaborative governance in flood mitigation in Padang City is influenced by differences in resources, authority, budgets, and access to information among actors, which foster interdependence. Facilitative leadership can strengthen coordination and reduce sectoral ego, although community involvement in strategic planning remains limited. Role distribution has been regulated by law, but data integration and transparency among agencies still need to be improved. The collaborative process has yielded initial achievements, including the installation of an Early Warning System (EWS), program synchronization, and drainage maintenance. However, shared commitment and understanding remain more focused on emergency response and managing the impacts of flooding than on addressing the root causes through ecological and preventive measures. Therefore, collaboration among the government, the community, and other stakeholders needs to be strengthened so that flood mitigation efforts in Padang can be carried out more effectively.

Keywords: Collaboration, Flood Disaster, Padang City.